

## **ABSTRAK**

Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono, NIM. 1711143050, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Dr. H. Asmawi, M. Ag.

Kata kunci: Pertimbangan Majelis Hakim, Pengadilan Agama, Gugatan, Sengketa Ekonomi Syari'ah, Putusan.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sengketa ekonomi syariah, salah satu Pengadilan Agama yang telah memutus sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Blitar. Putusan Nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar. Penggugat menggugat para Tergugat yang merupakan suatu lembaga perbankan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji dan Penggugat selaku koordinator PT. XXXXXX yang bergerak dalam usaha pemberangkatan Jama'ah Haji ke tanah suci sejak tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad wadi'ah yad dhomanah dengan Tergugat. Dalam gugatannya penggugat menuntut Para Tergugat untuk memberikan dana talangan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji ke tanah suci dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum/ingkar janji yaitu menghanguskan uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp6.974.661.000,- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil. Penggugat juga meminta sita jaminan harta benda milik Para Tergugat yang berupa tanah dan bangunan (gedung Wisma Mandiri I). Namun, Majelis Hakim memutus perkara ini Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar menolak gugatan sengketa perkara Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL?, 2) Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar menolak gugatan sengketa ekonomi syariah dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar menolak gugatan sengketa perkara Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, 2) Untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar menolak gugatan sengketa ekonomi syariah dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*). Proses pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi tentang pertimbangan majelis hakim menolak gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya. Sehingga gugatan Tergugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar. 2) Adapun dasar hukum pertimbangan majelis hakim menolak gugatan sengketa ekonomi syariah pengadilan agama blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL adalah Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pertimbangan mengenai Penggugat tidak berhak atas Pembayaran Dana Talangan Haji yang menjadi kewajiban Calon Haji. Hal itu sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat 1 Undang-undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Agustus 2012 tentang kerjasama Pendaftaran Haji meskipun sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata akan tetapi ternyata merupakan bukti adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat selaku koordinator dari KBIIH dengan Tergugat tentang Kerjasama Pendaftaran Haji di dalam perjanjian tersebut tidak ada satupun pasal yang memuat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000 tiap jama'ah haji kepada Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum.

## **ABSTRACT**

Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono, NIM. 1711143050, Consideration of the Blitar Religious Court Judge Board Refusing Syari'ah Economic Disputes Claims (Case Study in the Religious Court of Blitar Decision Number: 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL), Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Legal Sciences, IAIN Tulungagung, 2018, Advisor: Dr. H. Asmawi, M. Ag.

**Keywords:** Consideration of the Panel of Judges, Religious Courts, Lawsuits, Syari'ah Economic Disputes, Decisions.

This research is based on the existence of a sharia economic dispute, one of the Religious Courts which has decided on a sharia economic dispute is the Blitar Religious Court. Decision Number: 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL is a decision issued by the Agma Blitar Court. The Plaintiff sued the Defendants who were a banking institution with the accusation of committing an unlawful act or breaking a promise and the Plaintiff as the coordinator of PT. XXXXXX which is engaged in the effort to depart the Hajj Pilgrimage to the holy land since 2011 in August 2012 held a wad'ah contract for yad dhomanah with the Defendant. In the lawsuit the plaintiffs demanded the Defendants to provide a bailout amounting to Rp. 25,000,000 (twenty million rupiahs) for each congregation for the cost of departing pilgrims to the holy land and the Defendants had committed acts against the Law / broken promises namely scorched the money deposited by the Plaintiff to Defendant I amounting to Rp6,974,661,000 (six billion nine hundred seventy four million six hundred sixty one thousand rupiahs) with the reason to pay the ujroh and profit sharing. The Plaintiff also requested a bail of collateral belonging to the Defendants in the form of land and buildings (Wisma Mandiri I building). However, the Panel of Judges decided on this case to reject the Plaintiff's claim entirely.

The focus of this research are: 1) Why does the Religious Court Judge Board reject case disputes No. 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL?, 2) What does the meaning of the Blitar Religious Court Judges reject the lawsuit of the Sharia Economic Law in the Blitar Religious Court Number 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL? The objectives of this research are: 1) To find out the purpose of the Blitar Court of Judges, the lawsuit against the case disputes No. 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL, 2) To find out how the Blitar Religious Judge rejects the Islamic economic terms in the decision of the Blitar Religious Court Number 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL.

This type of research is called field research. The process of collecting data using the method of observation, in-depth interviews, and documentation about the consideration of the panel of judges rejected the Islamic economic disputes in the Blitar Religious Court. While the data analysis technique used in this study is data reduction, data presentation and verification of conclusions.

The results of this study indicate that: 1) Based on the considerations that have been made that the Plaintiff with the evidence presented by him, there is no evidence that is able to prove the arguments of his claim otherwise the Defendants with the evidence presented have been able to prove the arguments the argument of

the argument in the answer. So that the Defendant's lawsuit was completely rejected by the Blitar Religious Court Panel of Judges. 2) The legal basis for the consideration of the panel of judges rejecting the sharia economic dispute lawsuit of the religious court of Blitar Number 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL is Article 49 of Law No. 3 of 2006 concerning amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts, Considerations concerning Plaintiffs are not entitled to the payment of Hajj Bailout Funds which are the obligations of Hajj Candidates. This is in accordance with the article 63 paragraph 1 of Act No. 13 of 2008 concerning Hajj Organizing and based on a cooperation agreement made by the Plaintiff and Defendant on August 1, 2012 concerning the cooperation of Hajj Registration although in accordance with article 1320 of the Civil Code but it turns out to be evidence of Cooperation Agreement between Plaintiff as coordinator of KBIH with Defendant concerning Cooperation on Hajj Registration in the agreement there are no articles which contain the existence of an agreement which states that the Defendant will provide a bailout of Rp. 25,000,000 each pilgrim to the Plaintiff. Therefore the Plaintiff's claim was not legally proven.

## ملخص

محمد ستيفان بكتي اردبيونو، 1711143050، "نظر لجنة القضاة في محكمة الدينية بليتار ترفض دعوى نزاع اقتصادي الشريعة (دراسة حالة في محكمة بليتار الدينية رقم القرار: 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL)"، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة و علوم الحكم بالجامعة الإسلامية الحكومية تولونج اجونج، 2018، المشرف : الدكتور اسماعاوي، ماجستير الدين الحج.

الكلمة الرئيسية: نظر لجنة القضاة، المحكمة الدينية، الدعوى، نزاع الاقتصادية الشريعة، الحكم.

هذا البحث مدفوع بوجود نزاع اقتصادي للشريعة، واحد منهم المحاكم الدينية التي قررت أن النزاع الشرعي هو محكمة الدينية بليتار. رقم القرار: 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL هو الحكم الصادر عن محكمة الدينية بليتار. المدعون يقاضون المدعى عليهم وهي مؤسسة مصرافية بزعيم ارتكاب جريمة أو كسر الوعود والشاكي كمنسق PT XXXXXX ومشاركة في أعمال المغادرة الحج جماعة إلى الأراضي المقدسة منذ عام 2011 في أغسطس 2012 بعقد وديعة يدي الضمنة مع المدعى عليهم. في دعوى قضائية المدعى يقاضي المدعى عليهم لتوفير إنقاذ بقيمة خمسة وعشرون مليون روبيه كل جماعة من أجل تكلفة رحلة الحرم إلى الأرض المقدسة وقد ارتكب المتهمون أفعالا ضد القانون او كسر الوعود بإنفاق المال الذي يدفع من قبل الشاكية على المشكو ضده ستة مليارات وتسعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وستون ألف روبيه مع وجود أسباب لدفع الأجرور وتقاسم الأرباح كما طلب المدعى مصادرة ممتلكات المتهمين في شكل أرض ومبني (مبني ويسمى مانديري الأول) ومع ذلك ، فقد تفصل فريق القضاة في القضية التي رفضت مطالبة المدعى كلية.

تركيز هذا البحث: 1) لماذا مجلس المحاكم الدينية يرفض دعوى النزاعات رقم: PA.BL/2014/Pdt.G/3333 ؟ 2) ماذا الدليل إعتبار مجلس المحاكم بالمحكمة الدينية يرفض دعوى النزاعات رقم: PA.BL/2014/Pdt.G/3333 ؟ أما الأهداف في هذا البحث هي 1) لمعرفة حجة مجلس المحاكم يرفض دعوى النزاعات الإقتصادية الشريعة (الدراسة الحالية بالمحكمة الدينية بليتار إقرار رقم: PA.BL/2014/Pdt.G/3333 ) 2) لتحليل دليل إعتبار مجلس المحاكم بالمحكمة الدينية

يرفض دعوى النزاعات الإقتصادية الشريعة بالمحكمة الدينية بليتار إقرار PA.BL/2014/Pdt.G/3333 الرقم:

يشار إلى هذا النوع من الأبحاث على أنه بحث ميداني. عملية جمع البيانات باستخدام طريقة المراقبة والمقابلات المعمقة وتوثيق اعتبارات القضاة ترفض قضية النزاع في الشريعة الاقتصادية في محكمة الدينية بليتار. بينما تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هو الحد من البيانات، عرض البيانات والتحقق من الاستنتاج.

نتائج هذا البحث تدل على التالي 1) بناء على الإعتبارات أن المدعى قد قام بأدوات الأدلة المعنية تبين عدم الأدلة أدلة واحدة قادرة على إثبات يفترض الدعوى بدلاً من المدعى عليهم بالأدلة واتهم تمكنت من إثبات الحاجة المقترنات في الإجابة. بحيث المتهمون الزعم الذي رفضه تماما مجلس الحكم بالمحكمة الدينية بليتار. 2) وأما دليل حكم الإعتبارات بمجلس الحكم بالمحكمة الدينية بليتار يرفض دعوى النزاعات الإقتصادية الشريعة بالمحكمة الدينية بليتار إقرار الرقم: PA.BL/2014/Pdt.G/3333 هي المادة 49 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن تعديل القانون رقم 7 1989 اعتبارات المحاكم الدينية فيما يتعلق المدعى لا يحق لدفع الإنزال المرشح حاجي وهو فريضة الحج. هذا هو وفقا لصوت الفقرة 1 من القانون رقم المادة 13 63 لسنة 2008 بشأن الحج ويوجب اتفاق التعاون المقدمة من المدعى والمدعى عليه بتاريخ 1 أغسطس 2012 تسجيل التعاون الحج على الرغم من أن وفقا للمادة 1320 من القانون المدني، إلا أنه تبين أن تكون الأدلة اتفاقية تعاون بين المدعى كمنسق KBIH بالمدعى عليه عن حج التعاون التسجيل في أي اتفاق من المواد التي تحتوي على الاتفاق الذي ينص على أن المدعى عليهم سيوفر أموال خطة الإنقاذ البالغة 25.000.000 روبيه. لكل حاج بيت الله الحرام إلى المدعى. لذا المدعى لم يثبت قانونا.